



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN

# bangga  
melayani  
bangsa



# KEMENKUM KALSEL NEWS

# BULETIN

MINGGU KE- **3** MARET 2025



## KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[kumham\\_kalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](http://kalsel.kemenkum.go.id)

# Sinergi Layanan Hukum: Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkot Banjarbaru Bahas Penguatan Kerja Sama

Banjarbaru, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Senin, (17/03). Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Kantor Walikota Banjarbaru ini bertujuan untuk memperkuat sinergi terutama dalam penyelenggaraan layanan hukum di wilayah Banjarbaru.

Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta jajaran pada Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang juga turut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel, Yan Welly dan Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalsel, Karyadi. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kota Banjarbaru, audiensi diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Pemkot Banjarbaru, Abdul Basid, beserta jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyampaikan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum, terutama dalam urusan pemerintahan di bidang hukum yang bertujuan membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Banjarbaru, mengingat daerah ini memiliki kandidat potensial sebagai kawasan berbasis KI, seperti Kampung Pejabat dan Kampung Purun. Ia juga menyampaikan Catur Program Unggulan dalam bidang KI, yakni Jelajah KI, Akselerasi Penyelesaian KI, Mobile IP Clinic, dan pengembangan Kawasan Wisata Berbasis KI.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Kalsel mendorong peningkatan layanan dengan penyederhanaan proses legalisasi melalui Layanan Apostille, serta pemanfaatan Perseroan Perorangan guna mempermudah masyarakat dalam memiliki usaha berbadan hukum. "Kami juga meminta dukungan dari Pemkot Banjarbaru untuk mendorong Kepala Desa dan Lurah agar berpartisipasi dalam Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2025," ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel juga menyampaikan hasil Indeks Reformasi Hukum serta data harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkot Banjarbaru.

Plh. Sekretaris Daerah Banjarbaru, Abdul Basid, dalam sambutannya menyambut baik audiensi ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya tindak lanjut dari para stakeholder di Pemkot Banjarbaru terhadap kerja sama yang telah terjalin dengan Kementerian Hukum, khususnya terkait dengan nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarbaru semakin erat dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat.

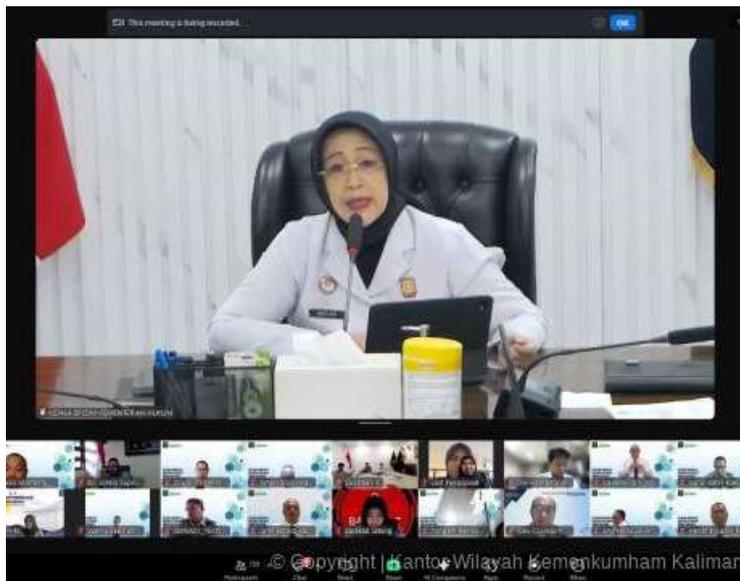


# Pimti Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hukum, Wujudkan Pelayanan Hukum yang Optimal



Banjarmasin, Humas\_Info - Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (17/03).

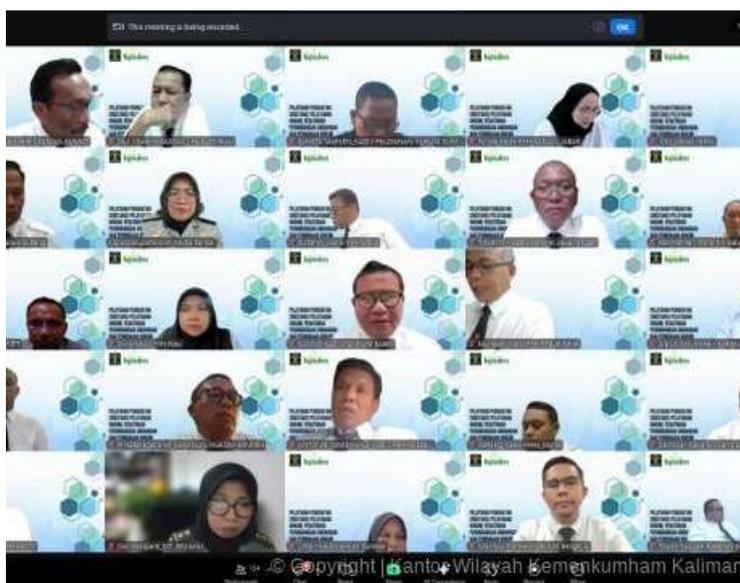
Kegiatan yang berlangsung mulai 17 Maret hingga 10 April 2025 diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui platform Zoom Meeting dan e-Learning Kemenkum.



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani dalam sambutannya menyampaikan tujuan utama pelatihan yang diikuti 99 orang peserta dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

“Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan berbagai materi dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), serta Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum. Materi yang diberikan mencakup penguatan fungsi pengawasan layanan kenotariatan, percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, teknik analisis hukum, serta strategi promosi Kekayaan Intelektual di era digital,” ucapnya.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI juga mengharapkan dengan adanya pelatihan ini, kompetensi para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum semakin meningkat, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan profesional.



Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti yang menjadi salah satu peserta dalam pelatihan ini menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait substansi pelayanan hukum, regulasi, dan pembinaan hukum, kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini guna memperkuat sinergi dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan pengawasan layanan hukum di daerah. Semoga melalui kegiatan ini, profesionalisme dan integritas dalam pelayanan hukum semakin meningkat,” pungkasnya.

## Kemenkum Kalsel Perkuat Sinergi dengan Satpol PP Banjarbaru: Fokus pada PPNS dan Kamtibmas



Banjarbaru, AHU\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru pada Senin (17/3/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Satpol PP Banjarbaru ini bertujuan untuk membahas pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) aktif serta inventarisasi permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarbaru.

Kegiatan koordinasi ini diikuti oleh sejumlah staf Bidang AHU Kanwil Kemenkum Kalsel, di antaranya Novita Sari, Muhammad Hatta, Mazidah, dan lainnya. Dari pihak Satpol PP Banjarbaru, hadir Kasubag Kepegawaian, Dianissa Damayanti, dan Syariadi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting dibahas, di antaranya:

- 1) PPNS yang sudah tidak aktif menyidik atau beralih tugas wajib membuat laporan kepada Kanwil Kemenkum Kalsel.
- 2) Saat ini terdapat 9 orang PPNS di Satpol PP Banjarbaru, dengan rincian 8 orang aktif dan 1 orang belum aktif karena belum dilantik.
- 3) PPNS wajib mengikuti asesmen di Kejaksaan Agung sebelum dapat dilantik oleh Kanwil Kemenkum Kalsel, sesuai dengan peraturan terbaru.
- 4) Koordinasi ini juga membahas berbagai kendala dan isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Banjarbaru, seperti minuman keras, hiburan malam, prostitusi online dan langsung, yang penindakannya selama ini dilakukan melalui tindak pidana ringan (tipiring).

Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Satpol PP Banjarbaru dalam penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Banjarbaru.



# Kolaborasi Kemenkum Kalsel dan Pemkot Banjarbaru: Demi Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Banjarbaru, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan layanan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di daerah. Hal ini diwujudkan melalui audiensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, bersama jajarannya, dengan Pemkot Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Abdul Basid, pada Senin (17/3).

Pertemuan ini menyoroti sejumlah langkah strategis untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Data terbaru menunjukkan, sepanjang 2024, Banjarbaru telah mengajukan 112 permohonan merek, 20 paten, 1 desain industri, dan 2.226 hak cipta. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat untuk melindungi karya dan inovasi lokal.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, dalam paparannya menyampaikan potensi pengembangan Kampung Pejabat dan Kampung Purun sebagai Kawasan Karya Cipta. Kedua kampung ini dinilai memiliki keunikan produk dan budaya lokal yang layak dilindungi secara hukum. “Ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Banjarbaru sekaligus melindungi hak masyarakat atas karya mereka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemkot Banjarbaru juga tengah memproses pendaftaran merek kolektif “Dahllia Barokah” sebagai upaya branding produk unggulan lokal. Pada 2025, inventarisasi merek kolektif baru akan digencarkan untuk memperkuat identitas dan nilai ekonomi produk UMKM setempat.

Meskipun menghadapi situasi efisiensi anggaran, Pemkot Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk tetap memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada 2025. Drs. Abdul Basid menyatakan dukungan program pendampingan pendaftaran HKI. “Kami akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk menggandeng mitra strategis dan program pendampingan HKI bagi UMKM dan komunitas kreatif,” ungkapnya.

Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkum Kalsel dan Pemkot Banjarbaru yang berlaku hingga 2027. MoU tersebut mencakup peningkatan pelayanan hukum, pengembangan budaya hukum, serta perlindungan HKI sebagai prioritas utama. “Kami berkomitmen mendampingi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual untuk kesejahteraan bersama,” tegas Nuryanti.

Drs. Abdul Basid juga menyambut positif sinergi ini. “Dukungan Kemenkum Kalsel sangat penting untuk memastikan produk lokal Banjarbaru terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Di tengah efisiensi anggaran, kolaborasi seperti ini menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan Banjarbaru semakin dikenal sebagai kota yang menghargai inovasi dan kreativitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang berkelanjutan.



# Optimalkan Regulasi Daerah: Tabalong Manfaatkan Aplikasi E-Harmonisasi



Banjarmasin, PPPH\_Info - Kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh Norma Zahriati, selaku Kepala Bagian Hukum, dan Muhammad Fiqreza Arham, sebagai Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pada Senin (17/03/2025)

Audiensi dimaksud diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Adapun maksud kedatangan perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong tersebut adalah dalam rangka konsultasi terkait penggunaan aplikasi E-Harmonisasi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang mana pada tanggal 25 Februari 2025 lalu telah diluncurkan secara nasional



Aplikasi berbasis digital ini dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap produk hukum di daerah, sehingga tercipta regulasi yang berkualitas, berkesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak bertentangan dengan dimensi pengharmonisasian lainnya.

Pada prinsipnya, pada saat pelaksanaan kegiatan launching aplikasi E-Harmonisasi, diinformasikan bahwa dalam perjalanannya aplikasi yang akan terintegrasi secara real time ini masih pada tahap proses penyusunan acuan yuridisnya, perumusan pedoman teknis, sampai dengan pembuatan akun untuk masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Daerah.



## Revisi Perda BPD Barito Kuala: Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan Peran Desa



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Selasa (18/03/2025).

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengajukan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan masa jabatan dan persyaratan anggota BPD.

Rapat harmonisasi ini dipimpin langsung oleh Eryck Yulianto selaku JFT Madya Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, didampingi perwakilan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala beserta jajaran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah.

Anton Edward Wardhana menyambut baik inisiasi Pemkab Barito Kuala dalam pengharmonisan Ranperda. Ia juga menjelaskan harmonisasi merupakan tugas dan fungsi (tusi) Kemenkum yang sebelumnya diemban oleh Kemenkumham yang telah bertransformasi. Dalam rancangan perubahan Perda tersebut, perubahan utama mencakup perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dengan batas maksimal dua periode, serta penetapan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan.

Jajaran perancang kantor wilayah turut aktif memberikan masukan terhadap Ranperda yang diajukan. Berbagai tanggapan disampaikan untuk dilakukan penyesuaian dengan kaidah penyusunan peraturan perundangan yang berlaku, baik secara tata naskah maupun unsur substansi teknis.

Pemerintah daerah berharap revisi ini dapat memperkuat peran BPD dalam pembangunan desa dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan perubahan ini, diharapkan BPD dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, sejalan dengan semangat pemberdayaan desa yang diusung dalam regulasi terbaru.



# Sosialisasi PJA 2025: Upaya Kemenkum Kalsel Perkuat Peran Hukum di Desa dan Kelurahan



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) terus mengoptimalkan pembinaan hukum dengan menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Paralegal Justice Award (PJA) Peacemaker Training 2025 serta Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Serentak. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana serta didukung oleh Kelompok Kerja PJA. Sosialisasi dilaksanakan melalui media daring (Zoom Meeting) dengan melibatkan Kepala Bagian Hukum, Camat, serta Kepala Desa/Lurah dari masing-masing daerah.



Dalam sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemaparan mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran PJA, baik di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Para Kepala Desa/Lurah juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran paralegal di desa, termasuk dalam pelayanan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan negosiasi, bantuan litigasi dan nonlitigasi, serta rujukan ke advokat.

Selain itu, Camat dan Sekretaris Daerah diharapkan dapat meneruskan informasi ini kepada Kepala Desa/Lurah agar semakin banyak yang berpartisipasi dalam ajang PJA. Keberadaan paralegal di desa dan kelurahan sangat penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa program ini merupakan upaya strategis dalam mendukung penguatan hukum di tingkat desa. "Dengan adanya Paralegal Justice Award, kami ingin memberikan apresiasi kepada Kepala Desa dan Lurah yang berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa hukum di wilayahnya serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujarnya.



Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Kalsel akan terus membuka ruang konsultasi serta memberikan pendampingan bagi Kepala Desa/Lurah yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Laporan hasil kegiatan juga akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bagian dari komitmen penguatan hukum di daerah. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak desa dan kelurahan yang berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari program PJA, sehingga akses hukum bagi masyarakat menjadi lebih luas dan merata di Kalimantan Selatan.

## Berbagi Berkah Ramadhan, Kanwil Kemenkum Kalsel Bagikan Takjil kepada Masyarakat

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadhan 1446 H. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (18/3/2025) di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, bersama para pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pegawai turun langsung membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di depan kantor. Sebanyak 100 paket takjil disiapkan untuk dibagikan dalam kegiatan yang bertujuan mempererat kebersamaan keluarga besar Kanwil Kemenkum Kalsel dengan masyarakat.

"Kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kami dengan masyarakat, terutama di bulan penuh berkah ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Nuryanti Widyastuti.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta disambut baik oleh masyarakat yang menerima takjil.



# Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Silaturahmi dan Kebersamaan



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Acara ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda dan dihadiri oleh seluruh Pimti Pratama serta pegawai di lingkungan Kemenkum Kalsel, Selasa (18/03).

Kegiatan yang dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti ini juga di hadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Welly Wiguna, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi.

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Acara ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda dan dihadiri oleh seluruh Pimti Pratama serta pegawai di lingkungan Kemenkum Kalsel, Selasa (18/03).

Kegiatan yang dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti ini juga di hadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Welly Wiguna, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi.

Kegiatan diawali dengan pemberian bingkisan kepada para Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari petugas Helpdesk, pengemudi (driver), petugas kebersihan (OB), dan petugas keamanan (security). Pemberian bingkisan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam mendukung operasional kantor.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi lebih dari itu, menjadi momentum mempererat tali silaturahmi, baik bagi pegawai yang beragama Islam maupun non-Muslim. "Kami harap acara ini dapat semakin memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan di antara seluruh pegawai," sebutnya.

Acara dilanjutkan dengan tausyiah dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Mohammad Mobarak. Dalam tausyiahnya, beliau mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan menyempurnakan rukun iman dan rukun Islam, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini.

Setelah tausyiah, kegiatan ditutup dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan buka puasa bersama, serta shalat Maghrib berjamaah. Suasana kebersamaan ini diharapkan terus terjalin baik di lingkungan Kementerian Hukum yang diharapkan bisa meningkatkan solidaritas dan efektifitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.



## Kakanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Branch Office Head BRI Banjarmasin Samudera, Sinergi Strategis Layanan Keuangan



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari Branch Office Head BRI Banjarmasin Samudera, Rabu (19/3). Kunjungan ini berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha.

Branch Office Head BRI Banjarmasin Samudera, Erwin, hadir bersama Consumer Business Manager, Yunizar Arif, serta Relationship Manager, Krishna Aditya. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas kerja sama strategis antara Kemenkum Kalsel dan Bank BRI, khususnya dalam mendukung operasional serta pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenkum Kalsel.

"Sinergi yang baik dengan mitra strategis seperti BRI sangat penting dalam menunjang berbagai aspek operasional, terutama dalam pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan transparan," ujar Nuryanti Widyastuti.



Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkum Kalsel dan BRI sebagai mitra strategis. Erwin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan menegaskan komitmen BRI dalam mendukung kebutuhan layanan keuangan bagi instansi pemerintah.

"Kami siap mendukung Kemenkum Kalsel dalam berbagai aspek layanan keuangan guna memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan anggaran yang optimal," ungkapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, mencerminkan hubungan kerja sama yang harmonis antara kedua pihak. Diharapkan sinergi ini terus berlanjut guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai program kerja Kemenkum Kalsel.



# Analisis Regulasi Paten: Kemenkum Kalsel Ikuti FGD Bersama BSK Hukum



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut serta dalam kegiatan Analisis Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum secara daring, Rabu (19/3).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, didampingi oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, M. Aji Rifani beserta tim. Selain Kalimantan Selatan, turut hadir pula perwakilan dari lima Kantor Wilayah lainnya, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) guna mengumpulkan data lapangan terkait kajian Analisis Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari para pemangku kepentingan mengenai efektivitas pelaksanaan permohonan paten berdasarkan regulasi yang ada. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.



Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi menuturkan pentingnya evaluasi regulasi agar kebijakan terkait permohonan paten dapat lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Melalui evaluasi ini, kami berharap melalui kegiatan ini terlaksana optimalisasi atas regulasi terkait sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif," ujarnya.

Sebagai latar belakang, kajian ini juga didasarkan pada hasil penelitian lapangan terkait Analisis Urgensi Kebijakan Perlindungan Terhadap Pemakai Terdahulu Paten yang dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM pada tahun 2024. Hasil kajian tersebut menemukan bahwa aturan eksisting masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, sementara telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan permohonan paten dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan kebijakan terbaru.



## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Webinar OKE KI: Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Ekonomi

Banjarmasin, KI\_Info – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia melalui berbagai inisiatif, salah satunya melalui webinar OKE KI yang bertema Tingkat Pembangunan Sistem Kekayaan Intelektual. Acara ini berlangsung pada Rabu (19/03) dan menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah, sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Andrieansjah menyoroti tahapan penting dalam pembangunan sistem KI serta merujuk pada teori dari Robert M. Sherwood yang terdapat dalam buku *IP and Economic Development*. Sherwood menjelaskan bahwa pengelolaan KI harus melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah Reward Theory, yaitu pengenalan awal terhadap konsep KI dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, tahap Recovery Theory menekankan perlunya pendaftaran KI guna memperoleh perlindungan hukum yang sah. Setelah itu, tahap Incentive Theory menyoroti bagaimana manajemen KI dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemiliknya.

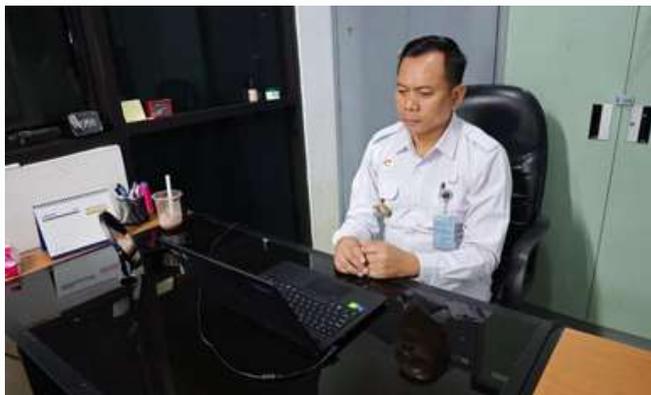
Pada tahap keempat, yaitu Risk Theory, KI mulai diakui sebagai aset berharga yang harus dikelola dengan baik agar tidak berisiko mengalami penyalahgunaan atau kehilangan hak. Puncaknya adalah Economic Growth Stimulus Theory, di mana KI menjadi poros utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Andrieansjah, pemahaman terhadap tahapan ini sangat penting agar setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem KI yang kuat. Selain menjelaskan teori Sherwood, Andrieansjah juga menguraikan lima tingkat pembangunan sistem KI yang mencerminkan sejauh mana sebuah negara telah mengelola kekayaan intelektualnya.

Tingkat pertama adalah edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KI. Kemudian, tingkat kedua diukur dari jumlah permohonan KI domestik dibandingkan dengan permohonan dari luar negeri. Selanjutnya, pada tingkat ketiga, KI mulai menjadi bagian dari strategi manajemen perusahaan atau institusi. Pada tingkat keempat, KI tidak lagi hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam bisnis dan industri. Tingkat tertinggi dalam pembangunan sistem KI adalah ketika KI benar-benar menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai tahap ini, diperlukan ekosistem KI yang inklusif dan efektif, yang tidak hanya disesuaikan dengan potensi lokal tetapi juga didukung oleh kebijakan yang mendorong inovasi dan perlindungan KI.

Webinar ini juga diikuti oleh Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, yang menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem kekayaan intelektual di tingkat regional. Dengan mengikuti diskusi dan pemaparan dari para ahli, diharapkan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan sistem KI secara bertahap dapat semakin meningkat. Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong kesadaran masyarakat serta membantu pelaku usaha dan inovator lokal dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi ekonomi.

Melalui webinar ini, para peserta mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana membangun ekosistem KI yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin maju dalam pengelolaan kekayaan intelektualnya, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



## Dorong Partisipasi Kepala Desa dan Lurah, Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi PJA 2025



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Paralegal Justice Award (PJA) 2025 dan Diklat Paralegal Serentak bagi enam kabupaten di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom ini diikuti oleh 78 peserta, terdiri dari Kepala Bagian Hukum, Camat, serta Kepala Desa dan Lurah dari Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Bumbu.



Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja PJA Kemenkum Kalsel ini bertujuan untuk mendorong keikutsertaan Kepala Desa dan Lurah dalam ajang Paralegal Justice Award 2025 dengan memberikan pemahaman terkait tata cara pendaftaran, persyaratan, mekanisme seleksi, serta manfaat yang diperoleh dalam ajang penghargaan ini.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar peserta mendapatkan pendampingan mengenai pentingnya peran paralegal di desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, serta bantuan litigasi dan nonlitigasi. Dalam sosialisasi ini, turut dibahas urgensi pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Keberadaan Posbankum diharapkan dapat menjadi pusat layanan hukum masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi anggota Kadarkum untuk mengikuti Diklat Paralegal Serentak.



Para peserta juga diberikan ruang diskusi dan tanya jawab terkait proses administrasi pendaftaran PJA, mekanisme seleksi daerah, dasar hukum Posbankum, serta anggaran penyelenggaraannya. Sebagai tindak lanjut, Kemenkum membuka layanan konsultasi bagi Kepala Desa dan Lurah yang mengalami kendala dalam pendaftaran PJA.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak Kepala Desa dan Lurah yang ikut serta dalam Paralegal Justice Award 2025, sehingga peran mereka sebagai Peacemaker dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan dapat semakin diperkuat.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Bimtek “Kejar Berkah” Tingkatkan Kualitas Penyampaian Pesan



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) turut berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis Spesial Ramadan “Kejar Berkah (Kelas Belajar bersama Anak Humas)” yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI. Mengusung tema “Mengelola Suara untuk Menyampaikan Pesan Lebih Bermakna”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi para insan humas di lingkungan Kemenkum.

Bimtek ini menghadirkan Tubagus Dian Kurniawan, Pengelola Keprotokolan pada Deputy Bidang Imigrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia membagikan wawasan mengenai teknik vokal yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan persuasif.

JFT Pranata Humas serta Pelaksana Kehumasan dari Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Materi yang diberikan dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan menyampaikan informasi dengan lebih baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para praktisi kehumasan di lingkungan Kemenkum, khususnya di Kanwil Kemenkum Kalsel, dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan bermakna.



# Kakanwil Kemenkum Kalsel Beri Arahan Jelang Libur Panjang



Banjarmasin, Humas\_Info - Menjelang libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Arahan Kepala Kantor Wilayah pada Kamis (20/03) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta para Pejabat Administrator Kantor Wilayah yang secara aktif mengikuti pengarahan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya penyesuaian pola kerja fleksibel menjelang hari libur panjang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. "Pada tanggal 21 Maret, seluruh pegawai tetap melaksanakan tugas secara penuh melalui skema Work From Office (WFO). Sedangkan pada tanggal 24 hingga 27 Maret, meskipun berlaku Work From Anywhere (WFA), saya tekankan agar seluruh pekerjaan, terutama yang mendesak, tetap diselesaikan dengan tanggung jawab penuh," ujar Nuryanti.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran selama Triwulan I Tahun 2025. "Saya ucapkan terima kasih atas semangat dan kerja keras rekan-rekan semua. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, kinerja kita baik dan masih on track, namun tentu masih bisa lebih ditingkatkan lagi," imbuhnya.

Menjelang cuti bersama, Kakanwil juga memberikan pesan praktis kepada seluruh pegawai untuk menjaga keamanan lingkungan kantor. "Pastikan semua peralatan elektronik dimatikan atau dilepas dari stop kontak, dan jangan tinggalkan makanan yang berpotensi basi di kulkas," tuturnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menegaskan bahwa pada tanggal 8 April 2025, setelah libur Idul Fitri, seluruh pegawai harus kembali fokus menyelesaikan target kinerja sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. "Perkuat sinergi dan kolaborasi, tingkatkan kembali disiplin kerja, dan segera rampungkan seluruh laporan serta data dukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Pegawai Teladan periode Maret kepada Dianor, salah satu pegawai berprestasi di lingkungan Kanwil. Momen kebersamaan pun semakin hangat dengan kegiatan saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan antar pegawai menjelang Libur dan cuti bersama Hari Raya.

## Maksimalkan Pengelolaan Aset Negara, Kanwil Kemenkum dan Kanwil Kementerian HAM Kalsel Bersinergi Jalin Kerjasama



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan secara resmi menandatangani Perjanjian Penggunaan Bersama dan Penggunaan Sementara atas Barang Milik Negara (BMN). Acara ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda pada Kamis (20/03) dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta pegawai dari kedua Kementerian.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam mendukung tugas dan fungsi kedua Kementerian pasca pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat Kementerian. Perjanjian ini menjadi landasan hukum dalam penggunaan bersama serta penggunaan sementara aset negara guna mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih baik.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bentuk sinergi yang nyata dalam pengelolaan aset negara.

“Dengan adanya perjanjian ini, kami berharap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing Kementerian. Ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat pasca pemekaran Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan kedua Kementerian dapat bersinergi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



## Menkum Supratman Berdialog dengan Mahasiswa Trisakti tentang RUU TNI



Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sebelumnya, Menkum telah berdialog dengan mahasiswa Universitas Trisakti di area gerbang Pancasila gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/03/2025) sore.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Menkum duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini. Mereka mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mengatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR. "Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman di lokasi.



"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

Usai pertemuan dengan para mahasiswa, Supratman menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi, melihat adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI. "Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

Selanjutnya, Menkum Supratman bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan pandangan-pandangan dari kelompok mahasiswa dengan almamater biru itu. Kemudian ia kembali untuk menemui para mahasiswa, namun mereka telah bubar meninggalkan lokasi area gedung DPR.



Adapun sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama pemerintah, Selasa (18/03/2025). Semua fraksi pun sepakat agar revisi UU TNI bisa dibawa ke rapat paripurna, yang dijadwalkan pada Kamis (20/03/2025) besok.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mengapresiasi langkah Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas, yang telah membuka ruang dialog dengan mahasiswa terkait RUU TNI.

"Sikap terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, adalah bagian penting dari proses demokrasi yang sehat. Keberanian mahasiswa Universitas Trisakti dalam menyampaikan pandangan mereka menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan terus berkembang secara dinamis. Kami berharap komunikasi yang telah dijembatani ini dapat mendukung kebijakan yang lebih komprehensif dan selaras dengan semangat reformasi," ungkapnya.

## Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Kesejahteraan Sosial, Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperbup HST

Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) menggelar rapat harmonisasi guna memastikan keselarasan dua rancangan peraturan bupati yang tengah disusun oleh Pemkab HST, Kamis (20/3/25).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta dihadiri oleh para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Mursyidi beserta jajaran, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah Syahbidin beserta jajaran, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Taufik Rahman beserta jajaran, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam rapat tersebut, dilakukan harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati, yakni Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelaksanaan Rumah Singgah Murakata. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 yang mengharuskan setiap kota dan kabupaten memiliki dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) sebagai acuan dalam pengelolaan persampahan selama minimal sepuluh tahun. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang termasuk kategori kota sedang dengan jumlah penduduk 268.360 jiwa, diwajibkan untuk menyusun dokumen ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah dalam jangka panjang. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga dirancang untuk melindungi sumber daya air, tanah, dan udara dari pencemaran serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Rumah Singgah Murakata disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya mereka yang terlantar. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan tugasnya dalam menyediakan tempat penampungan sementara bagi PMKS, meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar teknis, serta memberikan solusi dalam penanganan PMKS yang memerlukan bantuan.

Dalam rapat ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa harmonisasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas. Ia menekankan pentingnya pemantapan dan pembulatan konsep serta penyusunan regulasi yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang berada di bawahnya.

Diskusi dalam rapat ini juga mencakup pembahasan mengenai substansi dari kedua rancangan peraturan bupati, dengan peserta rapat memberikan masukan terkait aspek teknis, implementasi di lapangan, serta potensi kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Masukan yang diberikan bertujuan untuk menyempurnakan regulasi agar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Dokumen Hasil Harmonisasi Ranperda dan Ranperbup Pemkab Hulu Sungai Tengah



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyerahkan dokumen hasil perbaikan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang telah melalui proses harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST). Penyerahan dokumen ini merupakan langkah final dalam memastikan bahwa regulasi daerah yang disusun telah memenuhi aspek legalitas serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara simbolis, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyerahkan dokumen hasil harmonisasi kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik Rahman. Dalam kesempatan ini, Anton Edward Wardhana didampingi oleh Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, Eryck Yulianto, sebagai bagian dari tim yang turut berperan dalam proses harmonisasi regulasi daerah tersebut.

Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa proses harmonisasi telah dilakukan dengan cermat guna memastikan agar Ranperda dan Ranperbup yang disusun dapat segera ditindaklanjuti menjadi produk hukum daerah yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan regulasi, bertujuan untuk menyelaraskan norma dan substansi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik Rahman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dalam proses harmonisasi ini. Ia berharap dengan adanya pendampingan dari tim perancang peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih komprehensif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Dengan diserahkannya dokumen hasil harmonisasi ini, Pemkab Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat segera menindaklanjuti Ranperda dan Ranperbup tersebut ke tahap berikutnya, sehingga regulasi yang telah disusun dapat diberlakukan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

# Kemenkum Kalsel Tingkatkan Kualitas Kebijakan Melalui Diseminasi dan Asistensi Analisis Kebijakan

Banjarmasin, BSK\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut serta dalam kegiatan diseminasi dan asistensi pedoman kegiatan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum RI secara virtual pada Kamis (20/03/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja BSK Hukum Kantor Wilayah, yang diketuai oleh Eldy Prasetya Setiawan selaku Analis Hukum Muda beserta jajarannya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan demi peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang.

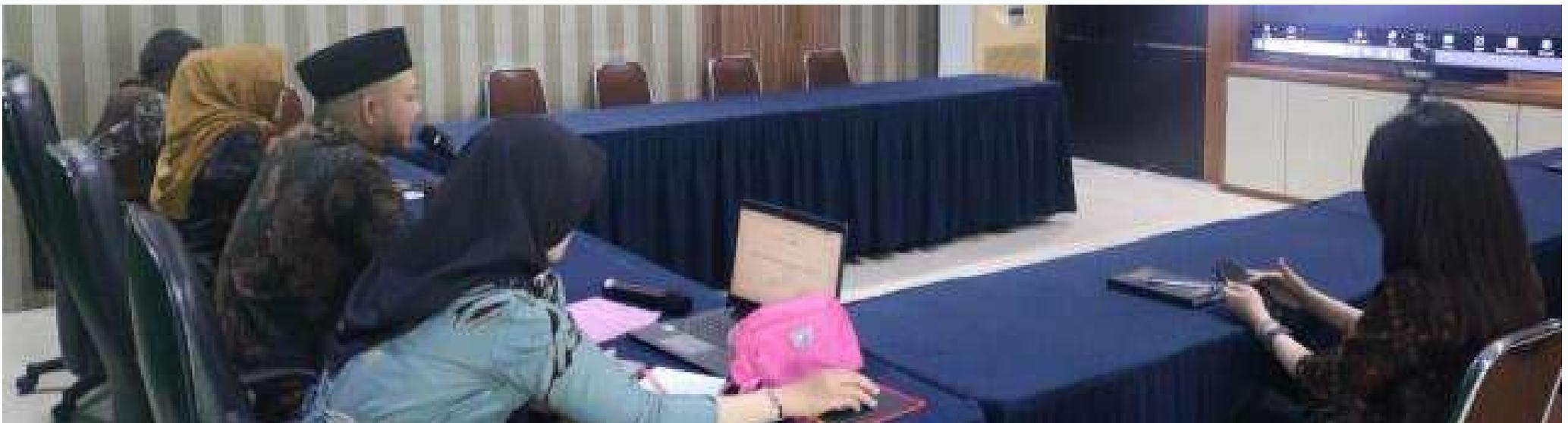
Shafira Elnanda Yasmine, Analis Kebijakan BSK Hukum Kemenkum RI, menyampaikan paparan rinci mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan tahun 2025 yang akan diterapkan di Kanwil Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, analisis kebijakan yang akan dilakukan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Analisis Strategi Implementasi Kebijakan dan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan. Analisis Strategi Implementasi Kebijakan I akan berfokus pada penyusunan strategi pelaksanaan kebijakan di wilayah, sementara Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan akan menilai efektivitas kebijakan berdasarkan penerimaan masyarakat dan dampak yang dihasilkan.

Setiap tahapan dalam kegiatan ini akan diawasi secara ketat oleh Tim Penyusun Analisis Kebijakan, dengan pendampingan dari PIC Asistensi. Hasil analisis yang diperoleh nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun BSK Hukum Kemenkum.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, seluruh dokumen administrasi dan substansi spesifik wajib dikumpulkan melalui platform digital yang telah disediakan. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses analisis kebijakan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan serta memberikan solusi strategis terhadap berbagai tantangan implementasi yang mungkin timbul di lapangan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenkum akan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.



## Rapat Pembangunan Gedung Kanwil, Evaluasi dan Persiapkan Pembangunan Gedung Kanwil Tahap II



Banjarmasin, Humas\_Info – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat pembangunan Gedung Kanwil di Banjarbaru tahap II yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Rapat ini dibuka oleh PPPK, Eko Herdianto, serta diikuti oleh perwakilan dari Biro Perencanaan, BMN, Inspektorat Wilayah V, dan tim teknis yang terdiri dari perencana maupun pengawas pada Kamis (20/03).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut hadir dalam rapat ini dan menyampaikan harapannya agar seluruh peserta rapat dapat memberikan masukan yang konstruktif. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan gedung ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.

”Kami berharap pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku. Masukan dari seluruh peserta sangat penting agar gedung ini tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan keamanan di masa mendatang,” ujar Nuryanti Widyastuti.

Gedung yang nantinya akan ditempati oleh dua Kementerian, yakni Kementerian Hukum dan Kementerian HAM dalam tahap penyesuaian desain awal karena Kanwil Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) berencana tetap beralamat di Banjarmasin sehingga harus disesuaikan lagi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

Pembangunan gedung ini juga diarahkan untuk dapat selesai pada tahun ini, sebagaimana instruksi dari Sekretaris Jenderal Kemenkum. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Saksikan Pelepasan Mudik Bersama Keluarga Besar Pengayoman, 1.160 Peserta Diberangkatkan



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel mengikuti secara virtual Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasaryakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025, dengan peserta dari Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti secara daring dari Balai Pertemuan Garuda.

Apel pelepasan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kanwil, pejabat manajerial, serta pejabat non-manajerial. Acara dimulai dengan laporan panitia, diikuti dengan sambutan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa mudik telah menjadi tradisi di Indonesia, khususnya saat Lebaran, dan mengucapkan selamat kepada para peserta yang akan pulang ke kampung halaman.

Sebanyak 1.160 peserta mudik diberangkatkan dalam program ini dengan menggunakan 34 armada Jetbus yang telah disiapkan. Pelepasan dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaryakatan, serta didampingi oleh Menteri HAM, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program Mudik Bersama ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan perjalanan para pemudik.

Kanwil Kemenkum Kalsel menyambut baik inisiatif ini dan turut berpartisipasi dalam mendukung kelancaran serta keselamatan mudik Lebaran tahun ini. Dengan adanya program mudik bersama, diharapkan seluruh peserta dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta.



# 34 Bus Diberangkatkan untuk Mudik Bareng Lintas 4 Kementerian



Jakarta - Sebanyak 34 bus diberangkatkan untuk mudik bareng lintas empat kementerian dengan tujuan tersebar ke tujuh kota, yakni Padang, Palembang, Lampung, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Sebanyak 1.160 pegawai yang berasal Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Imigrasi dan Pemasarakatan (IMIPAS), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS mengikuti kegiatan mudik bareng.

Menteri HAM, Natalius Pigi dalam sambutannya menyampaikan, agar seluruh pegawai tetap menjaga silaturahmi dan silaturahmi dengan sesama di bulan Ramadhan ini. "Sudah hampir mendekati satu bulan kita menjalankan ibadah Ramadan, ada dua makna ibadah yang terkandung didalamnya bagi yg menjalankan yaitu silaturahmi dan silaturahmi," ujar Pigi saat kegiatan pelepasan mudik bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/03/2026).

Menurut Menteri HAM, Mudik yang merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia ini memiliki makna menjaga silaturahmi dan silaturahmi dengan kerabat dan sanak saudara. Lebih lanjut Menteri HAM mengatakan, selain itu terdapat hal yang tidak kalah penting dan diajarkan di seluruh agama yaitu menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia dan menghormati bangsanya. "Apapun agamamu, suku apapun, kita harus saling menghormati antar sesama manusia," kata Pigi.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Setjen Kemenkum), Risman Somantri melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik 1446 H tahun 2025. "Mengangkat tema "Mudik Aman Sampai Tujuan", diharapkan bahwa mudik bersama yang diselenggarakan kali ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan membawa makna yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat," ujar Risman.

Karo Umum memastikan, bahwa setiap bus dan seluruh pengemudi sudah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai tiba dengan selamat ke tempat tujuan. "Seluruh pengemudi telah lolos tes urin, dan kesehatan, kemudian setiap bus juga telah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi serta fasilitas yang nyaman untuk mendukung perjalanan jauh," ungkap Risman.

Secara terpisah, Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan mudik bareng ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Pada dasarnya Kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian teknis di bawah satu kementerian koordinator." ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.

Akan tetapi, Ronald menjelaskan bahwa setelah terjadinya transformasi terhadap Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, maka pelaksanaan kegiatan ini tentunya menjadi ajang kolaborasi dan sinergi di antara empat kementerian tersebut. "Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, maka pada tahun ini kegiatan mudik bersama dilaksanakan oleh empat kementerian dan tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," tuturnya.

Peserta mudik dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu sebanyak 35 orang, dari Kementerian Hukum sebanyak 784 orang. Selain itu, dari Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 37, serta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebanyak 304. 34 jumlah armada bus telah disiapkan oleh mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS, yaitu dari Bank BRI sebanyak 11 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit, dan dari Bank Mandiri sebanyak 7 unit. Kemudian, dari PT. Telkom sebanyak 5 unit, dari PT. Solusi Bangun Indonesia sebanyak 2 unit, dan sisanya dari internal kementerian.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya program mudik bareng lintas kementerian ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap para pegawai dalam menjalankan tradisi mudik yang aman dan nyaman. "Kegiatan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pegawai dalam merayakan Hari Raya bersama keluarga, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan, sinergi, serta kolaborasi antar kementerian. Kami berharap seluruh peserta mudik dapat tiba di tujuan dengan selamat dan merasakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga," ucapnya.



**KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumhamkalsel](#)



[kumham\\_kalsel](#)



[kalsel.kemenkumham.go.id](#)